KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN *POLICY BRIEF* PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA



2026

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2026

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 61 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN EDITOR KURIKULUM DAN SILABUS SERTA KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP) PEMBELAJARAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus kerangka acuan program (KAP) pembelajaran;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dianggap mampu melaksanakan tugas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diterbitkan surat keputusan;

Meningat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama;
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 605 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA, BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN EDITOR KURIKULUM DAN SILABUS SERTA KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP) PEMBELANJARAN TAHUN 2026.
KESATU	:	Terhitung sejak tanggal ditetapkan, menetapkan nama-nama terlampir untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan, Pengembangan dan Editor Kurikulum dan Silabus serta Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran Tahun 2026.
KEDUA	:	Melaporkan hasil kerja kepada Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2026

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen,
Kepemimpinan dan Moderasi
Beragama



Musyarrafah Amin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : 61 TAHUN 2026
Tanggal : 14 September 2026

DAFTAR TIM PENYUSUN/TIM PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN SILABUS SERTA KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP)
PEMBELAJARAN TAHUN 2026

No	Produk NSPK	Penyusun
	Kurikulum dan Silabus	
1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Ainun Fitriyati, S.Ag., M.M. 2. Dr. Hj. Heni Mardiningsih, S.E., M.Si
2	Pelatihan Teknis Presentasi Efektif	1. Dr. Neneng Maria Kiptyah, S.Pd., M.Pd.
	Kerangka Acuan Program Pembelajaran	
1	Bimbingan Teknis Pensiun Berdaya	1. Devi Yonesi, S.E., M.AP. 2. Ni Putu Dian Darmapatni, M.Si.
2	Bimbingan Teknis Penguatan Kepemimpinan Transformasional Madrasah	1. Dr. Mardiyanti, M.Pd.
3	Bimbingan Teknis Penguatan Personal *Branding* bagi ASN	1. Dr. Ispawati Asri, M.M. 2. Gaffar Mohammad Jahid, S.E., M.M.
4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	1. Sri Mulyati, S.E., M.M. 2. Hj. Afiati, S.E., M.AB.
5	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan	1. Hj. Djubaidah, S.Ag., M.Pd. 2. Yulianti, M.Pd.
6	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Rahmiyati, S.E., M.AP. 2. Andika Fauzan Satrio, S.Pd.
7	Bimbingan Teknis Menulis Karya Ilmiah Praktis di Era Teknologi Digital	1. Nursanti, S.IPI., M,Pd.
8	Bimbingan Teknis Implementasi Kinerja dalam Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	1. Dr. Siti Kusriyah, S.Ag., M.Pd.
9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Umum Pengelola PBJ	1. Amik Tri Istiami, S.Pd., M.M.
10	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	1. Dr. Siti Kusriyah, S.Ag., M.Pd. 2. Dr. Hj. Nikmatul Afiyah, S.Sos., M.Si.
11	Bimbingan Teknis Seni Penguasaan *Public Speaking*	1. Dr. Nurhasanah, S.Sos., M.Pd. 2. Endah Prasetyani, S.Kom., M.M
12	Workshop Kepemimpinan Adaptif	1. Dr. Siti Kusriyah, S.Ag., M.Pd. 2. Dr. Mardiyanti, M.Pd.
13	Bimbingan Teknis Penyusunan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama	1. Farida Ishak Indrawan, S.E., M.AP. 2. Cahaya Ningsih, S.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

BIMBINGAN TEKNIS

PENYUSUNAN *POLICY BRIEF* PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

PUSBANGKOM MKMB

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama, peserta diharapkan mampu memahami konsep, menganalisis permasalahan kebijakan, menyusun alternatif kebijakan, serta menghasilkan *policy brief* yang sistematis, berbasis bukti (*evidence-based*), argumentatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengambil keputusan dalam mendukung pembangunan bidang agama.

Secara khusus, peserta mampu:

1. Memahami dan dapat menjelaskan konsep, karakteristik, fungsi, dan kedudukan *policy brief* sebagai instrumen *evidence-informed policy*, mengidentifikasi *decision maker* dan *target audience*, serta menajamkan isu strategis menjadi masalah kebijakan prioritas melalui perumusan *problem statement*, *policy question*, analisis urgensi, dan akar masalah secara tepat.
2. Mengidentifikasi, memetakan, dan menilai kualitas bukti yang relevan, menganalisis kondisi permasalahan berdasarkan data, mendiagnosis faktor penyebab, serta memetakan pemangku kepentingan dan kepentingannya sebagai dasar penyusunan analisis kebijakan yang berbasis bukti.
3. Mengidentifikasi kondisi kebijakan yang berjalan, merumuskan alternatif kebijakan yang relevan, serta melakukan penilaian dan perbandingan alternatif berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan *trade-off*, manfaat, risiko, dan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan.
4. Menentukan pilihan kebijakan dan merumuskan rekomendasi yang jelas, realistis, dan dapat ditindaklanjuti, serta menyusun strategi implementasi, menentukan instrumen kebijakan, indikator keberhasilan, dan langkah mitigasi risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan rekomendasi kebijakan.
5. Menyusun *policy brief* sesuai struktur dan sistematika yang efektif, menyajikan data, bukti, argumentasi, dan rekomendasi kebijakan secara ringkas, jelas, persuasif, dan sesuai kebutuhan pengambil keputusan, dengan tetap menerapkan prinsip etika penulisan dan penggunaan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menyusun draft *policy brief* secara utuh, melakukan reviu dan penyempurnaan berdasarkan masukan dan kriteria kualitas, mengomunikasikan substansi kebijakan, melakukan finalisasi dokumen, serta menyusun rencana tindak lanjut pemanfaatan *policy brief* dalam proses pengambilan kebijakan.

B. KEBUTUHAN STRATEGIS

Perkembangan dinamika pembangunan bidang agama yang semakin kompleks menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memahami isu strategis, menganalisis permasalahan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan secara tepat dan berbasis bukti. Proses pengambilan keputusan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi, tetapi membutuhkan dukungan data, hasil analisis yang komprehensif, serta dokumen kebijakan yang mampu menyajikan permasalahan dan alternatif solusi secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

Di sisi lain, dokumen kebijakan yang tersedia belum selalu mampu menjembatani hasil analisis dengan kebutuhan pimpinan sebagai pengambil keputusan. Masih diperlukan penguatan kompetensi dalam penyusunan *policy brief* yang memiliki struktur jelas,

PUSBANGKOMMKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

argumentasi kuat, menggunakan sumber bukti yang relevan, serta mampu menyajikan alternatif dan rekomendasi kebijakan secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dalam penyusunan *policy brief* sebagai salah satu instrumen pendukung perumusan kebijakan yang efektif. Melalui bimbingan teknis penyusunan *policy brief* pembangunan bidang agama, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi isu prioritas, mengolah dan menganalisis bukti, merumuskan masalah kebijakan, menyusun alternatif kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif. Dengan demikian, tersedianya *policy brief* yang berkualitas diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, memperkuat tata kelola pembangunan bidang agama, serta meningkatkan kualitas kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran program Bimbingan Teknis Penyusunan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama adalah pejabat pada Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Perencana, Pejabat struktural/administrasi, serta pejabat pada jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan proses perumusan, analisis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama. Sasaran tersebut mencakup pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam menyiapkan bahan kebijakan, mengelola program dan kegiatan, melaksanakan kajian, mengolah dan menganalisis data, serta memberikan dukungan substantif bagi proses pengambilan keputusan.

Program ini diprioritaskan bagi peserta yang dalam pelaksanaan tugas jabatannya memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan kebijakan, menyusun analisis berbasis bukti, mengembangkan alternatif kebijakan, merumuskan rekomendasi, serta menyusun naskah kebijakan yang komunikatif dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan atau pengambil keputusan. Dengan demikian, peserta diharapkan memiliki keterkaitan langsung antara kompetensi yang diperoleh selama pembelajaran dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada unit kerja masing-masing, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan bidang agama.

D. MODEL PEMBELAJARAN

Model pembelajaran dalam Bimbingan Teknis Penyusunan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama dapat dilaksanakan melalui pembelajaran klasikal atau tatap muka, baik secara luring maupun daring. Pembelajaran klasikal secara luring dilaksanakan melalui interaksi langsung antara pengajar/fasilitator dan peserta dalam ruang pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses penyampaian materi, diskusi, analisis kasus, latihan terstruktur, praktik penyusunan *policy brief*, konsultasi, serta pemberian umpan balik secara intensif. Adapun pembelajaran klasikal secara daring dilaksanakan secara sinkron/*online* dengan memanfaatkan platform konferensi digital yang memungkinkan interaksi dua arah secara langsung antara pengajar/fasilitator dan peserta.

Dalam pelaksanaannya, kedua moda pembelajaran tersebut tetap mengedepankan prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogy*), pembelajaran berbasis kasus (*case-*

PUSBANGKOM WKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

based learning), pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), dan pembelajaran berbasis produk (*product-based learning*), dengan menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Setiap tahapan pembelajaran diarahkan untuk membangun kompetensi peserta secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan pembangunan bidang agama, mengumpulkan dan menganalisis bukti (*evidence*), menyusun alternatif kebijakan, menilai kelayakan dan konsekuensi setiap alternatif, merumuskan rekomendasi kebijakan, hingga menyajikannya dalam bentuk *policy brief* yang ringkas, argumentatif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan pengambil keputusan.

E. STRUKTUR KURIKULUM/SKENARIO PEMBELAJARAN

No	Materi	Sub Materi	JP
1	Konsep Dasar *Policy Brief* dan Penajaman Isu serta perumusan masalah kebijakan	1.1 Karakteristik, fungsi, dan kedudukan *policy brief* dalam proses kebijakan 1.2 Policy brief sebagai instrumen *evidence-informed policy* 1.3 Perbedaan *policy brief* dengan produk analisis kebijakan lainnya 1.4 *Decision maker, target audience*, dan tujuan penyusunan *policy brief* 1.5 Identifikasi isu strategis dan pemilihan masalah prioritas kebijakan 1.6 Perumusan *problem statement* dan *policy question* 1.7 Analisis urgensi dan akar masalah kebijakan	6
2	Analisis Bukti dan Diagnosis Masalah Kebijakan	2.1 *Evidence mapping* dan kualitas sumber bukti 2.2 Analisis kondisi masalah berdasarkan data 2.3 Diagnosis masalah dan analisis faktor penyebab 2.4 *Stakeholder mapping* dan analisis kepentingan	5
3	Perumusan dan Analisis Alternatif Kebijakan	3.1 Identifikasi kondisi kebijakan saat ini dan alternatif kebijakan 3.2 Penilaian dan pemilihan alternatif kebijakan 3.3 Analisis *trade-off* dan risiko alternatif kebijakan	4
4	Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Implementasi	4.1 Penentuan pilihan kebijakan dan penyusunan rekomendasi 4.2 Strategi implementasi dan instrumen kebijakan 4.3 Indikator keberhasilan dan mitigasi risiko	3
5	Teknik Penulisan dan Komunikasi *Policy Brief*	5.1 Struktur dan sistematika *policy brief* 5.2 Teknik penyajian dan komunikasi kebijakan 5.3 Etika penulisan dan penggunaan sumber	3
6	Praktik Penyusunan dan Reviu *Policy Brief* serta Rencana Tindak Lanjut	6.1 Penyusunan draft *policy brief* 6.2 Reviu dan penyempurnaan *policy brief* 6.3 Review, *policy pitch*, dan finalisasi 6.4 Rencana tindak lanjut pemanfaatan *policy brief*	4
JUMLAH JP			**25**

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. URAIAN MATERI

1. Konsep Dasar *Policy Brief* dan Penajaman Isu serta Perumusan Masalah Kebijakan (6 JP)

a. Sub Pokok Bahasan

1) Konsep dasar *policy brief*
2) Karakteristik, fungsi, dan kedudukan *policy brief* dalam proses kebijakan
3) *Policy brief* sebagai instrumen *evidence-informed policy*
4) Perbedaan *policy brief* dengan produk analisis kebijakan lainnya
5) *Decision maker, target audience*, dan tujuan penyusunan *policy brief*
6) Identifikasi isu strategis dan pemilihan masalah prioritas kebijakan
7) Perumusan *problem statement* dan *policy question*
8) Analisis urgensi dan akar masalah kebijakan

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

Materi ini membahas pemahaman dasar mengenai *policy brief* sebagai instrumen komunikasi kebijakan yang berfungsi menyampaikan hasil analisis, bukti, dan rekomendasi secara ringkas, sistematis, serta berorientasi pada kebutuhan pengambil keputusan. Pembahasan mencakup karakteristik, fungsi, dan kedudukan *policy brief* dalam proses kebijakan, perbedaan *policy brief* dengan produk analisis kebijakan lainnya, serta peran policy brief sebagai instrumen *evidence-informed policy*. Peserta diarahkan untuk memahami hubungan antara isu strategis, masalah kebijakan, pengambil keputusan (*decision maker*), dan sasaran pembaca (*target audience*) dalam penyusunan dokumen kebijakan. Selain itu, materi ini membahas proses penajaman isu melalui identifikasi masalah prioritas, penyusunan *problem statement* dan *policy question*, delimitasi masalah, analisis urgensi, serta pengenalan akar masalah melalui pendekatan seperti *problem tree* atau analisis sebab-akibat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

2. Analisis Bukti dan Diagnosis Masalah Kebijakan (5 JP)

a. Sub Pokok Bahasan

1) *Evidence mapping* dan kualitas sumber bukti
2) Analisis kondisi masalah berdasarkan data
3) Diagnosis masalah dan analisis faktor penyebab
4) *Stakeholder mapping* dan analisis kepentingan

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

Materi ini membahas proses analisis masalah kebijakan berbasis bukti (*evidence-based analysis*) melalui pengumpulan, pemetaan, dan penilaian kualitas sumber informasi yang relevan. Peserta diarahkan untuk memahami penggunaan berbagai sumber bukti seperti data primer, data sekunder, regulasi, hasil penelitian, dan dokumen evaluasi sebagai dasar dalam memahami kondisi permasalahan. Pembahasan mencakup teknik *evidence mapping*, analisis kondisi masalah berdasarkan data, identifikasi tren, kesenjangan (*gap*), *baseline*, serta pembandingan kondisi (*benchmarking*) untuk memperoleh gambaran

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masalah secara komprehensif. Selain itu, materi ini membahas proses diagnosis masalah melalui analisis faktor penyebab, dampak masalah, serta pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dan analisis kepentingan untuk memahami aktor yang berperan dalam proses kebijakan. Hasil pembelajaran pada tahap ini diarahkan untuk menghasilkan pemetaan bukti dan diagnosis masalah sebagai dasar perumusan pilihan kebijakan.

3. Perumusan dan Analisis Alternatif Kebijakan (4 JP)

a. Sub Pokok Bahasan

1) Identifikasi kondisi kebijakan saat ini dan alternatif kebijakan
2) Penilaian dan pemilihan alternatif kebijakan
3) Analisis *trade-off* dan risiko alternatif kebijakan

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

Materi ini membahas tahapan penyusunan berbagai pilihan kebijakan sebagai respon terhadap masalah yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis bukti dan diagnosis masalah. Peserta mempelajari cara memahami kondisi kebijakan saat ini (*status quo*) sebagai dasar pembanding, kemudian mengembangkan beberapa alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk diterapkan. Setiap alternatif dianalisis berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, pemerataan (*equity*), aspek legalitas, kelayakan administratif, kelayakan politik, dan keberlanjutan kebijakan (*sustainability*). Selain itu, peserta mempelajari proses penyaringan pilihan kebijakan (*screening options*), penilaian alternatif (*option appraisal*), analisis *trade-off*, risiko, serta kemungkinan konsekuensi yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) dari setiap pilihan kebijakan. Hasil akhir tahap ini adalah tersusunnya matriks pilihan kebijakan (*policy options matrix*) sebagai dasar menentukan kebijakan yang paling sesuai.

4. Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Implementasi (3 JP)

a. Sub Pokok Bahasan

1) Penentuan pilihan kebijakan dan penyusunan rekomendasi
2) Strategi implementasi dan instrumen kebijakan
3) Indikator keberhasilan dan mitigasi risiko

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

Materi ini membahas proses formulasi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis alternatif kebijakan yang telah dilakukan. Peserta diarahkan untuk mampu menentukan pilihan kebijakan utama (*preferred option*) serta menyusun rekomendasi yang bersifat spesifik, dapat dilaksanakan, dan memiliki argumentasi yang kuat. Pembahasan mencakup penyusunan kerangka rekomendasi (*recommendation framework*), penentuan pihak yang bertanggung jawab, tindakan yang perlu dilakukan, instrumen kebijakan yang digunakan, tahapan implementasi, serta strategi menghadapi risiko pelaksanaan. Selain itu, peserta mempelajari penyusunan indikator keberhasilan dan mekanisme mitigasi risiko agar rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memberikan dampak yang terukur dalam mendukung pembangunan bidang agama.

5. Teknik Penulisan dan Komunikasi *Policy Brief* (3 JP)

a. Sub Pokok Bahasan

1) Struktur dan sistematika *policy brief*
2) Teknik penyajian dan komunikasi kebijakan
3) Etika penulisan dan penggunaan sumber

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

Materi ini membahas teknik penyusunan dan penyampaian *policy brief* agar mampu menjadi dokumen komunikasi kebijakan yang efektif bagi pengambil keputusan. Peserta mempelajari struktur dan sistematika *policy brief*, mulai dari penyusunan judul, ringkasan eksekutif (*executive summary*), konteks masalah, penyajian bukti, pilihan kebijakan, rekomendasi, hingga penyusunan pesan utama (*key messages*). Selain aspek struktur, materi ini membahas teknik komunikasi kebijakan melalui penggunaan bahasa yang ringkas, jelas, persuasif, dan sesuai dengan karakter pembaca kebijakan. Peserta juga mempelajari prinsip penyajian data, visualisasi informasi, penggunaan sitasi, serta etika penulisan agar *policy brief* memiliki kualitas akademik sekaligus mudah dipahami oleh pengguna kebijakan.

6. Praktik Penyusunan dan Reviu *Policy Brief* serta Rencana Tindak Lanjut (4 JP)

a. Sub Pokok Bahasan

1) Penyusunan draft *policy brief*
2) Reviu dan penyempurnaan *policy brief*
3) Review, *policy pitch*, dan finalisasi
4) Rencana tindak lanjut pemanfaatan *policy brief*

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

Materi ini membahas praktik penyusunan *policy brief* secara menyeluruh dengan menerapkan seluruh tahapan pembelajaran mulai dari identifikasi masalah, analisis bukti, diagnosis masalah, penyusunan alternatif kebijakan, hingga formulasi rekomendasi. Peserta melakukan penyusunan draft *policy brief* berdasarkan lembar kerja atau hasil analisis yang telah dikembangkan, kemudian mengikuti proses konsultasi substansi, reviu, dan penyempurnaan dokumen. Tahapan ini juga mencakup kegiatan *writing clinic* untuk memastikan konsistensi hubungan antara masalah, bukti, alternatif, dan rekomendasi (*problem–evidence–options–recommendation*), serta kegiatan *peer review* dan *policy pitch* untuk menguji kualitas argumentasi dan efektivitas komunikasi kebijakan. Pada tahap akhir, peserta melakukan finalisasi dokumen dan menyusun rencana tindak lanjut pemanfaatan *policy brief* sebagai bahan pendukung perumusan dan pengembangan kebijakan pada unit kerja masing-masing.

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. JADWAL

1. Klasikal tatap muka luring (3 Hari)

NO	HARI	MATERI	JP
1	H-1	Konsep Dasar *Policy Brief* dan Penajaman Isu serta Perumusan Masalah Kebijakan	6
	H-1	Analisis Bukti dan Diagnosis Masalah Kebijakan	2
2	H-2	Analisis Bukti dan Diagnosis Masalah Kebijakan (Lanjutan)	3
	H-2	Perumusan dan Analisis Alternatif Kebijakan	4
	H-2	Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Implementasi	3
3	H-3	Teknik Penulisan dan Komunikasi *Policy Brief*	3
	H-3	Praktik Penyusunan dan Reviu *Policy Brief* serta Rencana Tindak Lanjut	4
JUMLAH JP			**25**

2. Klasikal tatap muka daring (4 Hari)

NO	HARI	MATERI	JP
1	H-1	Konsep Dasar *Policy Brief* dan Penajaman Isu serta Perumusan Masalah Kebijakan	6
2	H-2	Analisis Bukti dan Diagnosis Masalah Kebijakan	5
3	H-3	Perumusan dan Analisis Alternatif Kebijakan	4
	H-3	Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Implementasi	3
4	H-4	Teknik Penulisan dan Komunikasi *Policy Brief*	3
	H-4	Praktik Penyusunan dan Reviu *Policy Brief* serta Rencana Tindak Lanjut	4
JUMLAH JP			**25**

H. KUALIFIKASI PENGAJAR

1. Widyaiswara, Analis Kebijakan, pejabat fungsional, akademisi, praktisi, atau tenaga ahli yang **memiliki kompetensi dan pengalaman** dalam bidang kebijakan publik, analisis kebijakan, dan penyusunan *policy brief*.
2. Menguasai konsep kebijakan publik, analisis masalah kebijakan, *evidence-informed policy*, analisis bukti, penyusunan alternatif kebijakan, perumusan rekomendasi, serta strategi implementasi kebijakan.
3. Memahami teknik penyusunan policy brief, meliputi penajaman isu, perumusan masalah kebijakan, *evidence mapping*, diagnosis masalah, *stakeholder mapping*, analisis alternatif kebijakan, penulisan, dan reviu *policy brief.*

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Memiliki pengalaman dalam penyusunan, pendampingan, reviu, penelitian/kajian, atau pemanfaatan *policy brief* dan produk analisis kebijakan lainnya.
5. Memahami Panduan Penulisan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama Kementerian Agama, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan, serta regulasi lain yang relevan.
6. Memiliki kemampuan fasilitasi pembelajaran orang dewasa (*andragogy*), pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*), dan pembelajaran berbasis produk (*product-based learning*).

I. BENTUK EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, kualitas pengajar, mutu layanan penyelenggaraan, serta manfaat program bagi peserta dan unit kerja. Bentuk evaluasi meliputi:

1. Evaluasi Kepuasan Penyelenggaraan Program Pembelajaran
2. Evaluasi Capaian Pembelajaran Peserta, melalui *pre-test* dan *post-test,* partisipasi selama pembelajaran, penyelesaian lembar kerja/tugas/draft *policy brief* dan RTL.
3. Evaluasi Pengajar/Narasumber
4. Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi

J. SUMBER BELAJAR

1. Keputusan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Nomor 106 Tahun 2025 tentang Panduan Penulisan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama.
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan.
3. Dokumen perencanaan dan kebijakan Kementerian Agama serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pembangunan bidang agama.
4. Data, hasil penelitian, laporan kajian, hasil evaluasi program, dan sumber bukti (*evidence*) yang relevan dengan isu kebijakan.
5. Bahan ajar/modul, bahan tayang, dan buku referensi.
6. Contoh dokumen *policy brief*, studi kasus, dan lembar kerja penyusunan *policy brief.*

Jakarta, 28 September 2026

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi
Beragama

Musyarrafah Amin

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA

BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN AGAMA RI

2026